

Kementerian PPN / Bappenas

"Metadata untuk Penyusunan Rencana Aksi yang Partisipatif "

Setyo Budiantoro

Manager Pilar Pembangunan Ekonomi, Sekretariat TPB/SDGs
Kementerian PPN/Bappenas

Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk SDGs

Jakarta, 14-15 November 2017



Struktur Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs

- ✓ **Perpres No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB**





Dewan Pengarah
Dipimpin oleh Presiden RI

Koordinator Pelaksana
Menteri PPN/Kepala Bappenas

Tim Pelaksana
Dikoordinasikan oleh Deputi Bidang KSDA, Kemen PPN/Bappenas

Tim Pakar

Sekretariat

Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial

Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi

Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan

Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola

Butir-Butir Arahan Perpres No. 59 tahun 2017 (5)

Tugas Tim Pelaksana (Pasal 10 dan Pasal 11) :

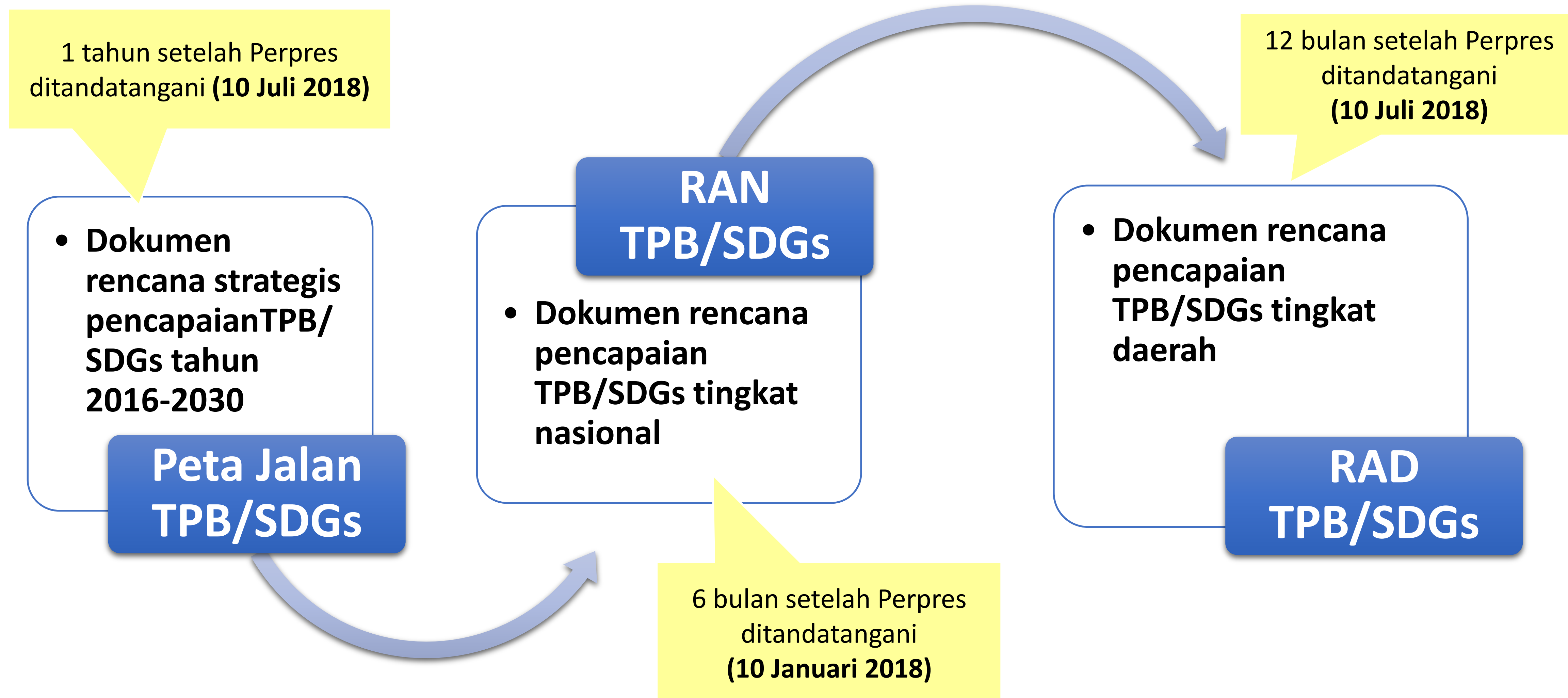
a. Tim Pelaksana bertugas melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB.

b. **Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin secara bersama** yang diketuai oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pemba**anggota yang terdiri** ngunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan **dari unsur-unsur kementerian/lembaga, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, dan Ormas.**

c. Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dibantu oleh Kelompok Kerja.

Kementerian PPN/ Bappenas

Batas Waktu Penyelesaian Dokumen TPB (Pasal 20) :



Kementerian PPN/
Bappenas

TEKNIS PENYUSUNAN RAN TPB/SDGS



Pengertian RAN TPB/SDGs menurut Perpres No 59 Tahun 2017

- Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran nasional.

Keterlibatan dan Peran Pemangku Kepentingan

Prinsip Kemitraan



Trust Building



Equal Partnership



Participation



Accountable



Mutual Benefits

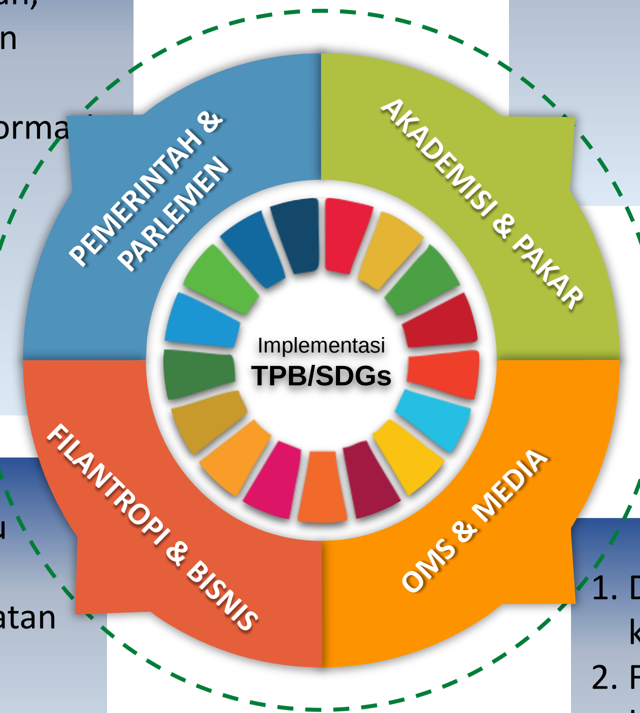
Platform Partisipasi TPB/SDGs

P

1. Penetapan Indikator dalam Setiap Target/Sasaran
2. Pengembangan Kebijakan, Regulasi, & Penyelarasan Program /Kegiatan
3. Penyiapan Data dan Informasi yang Digunakan
4. Sosialisasi/Diseminas, Komunikasi & Advokasi
5. Monev & Pelaporan
6. Pendanaan

A

1. Peningkatan Kapasitas
2. Pemantauan dan Evaluasi
3. *Policy Research*



F

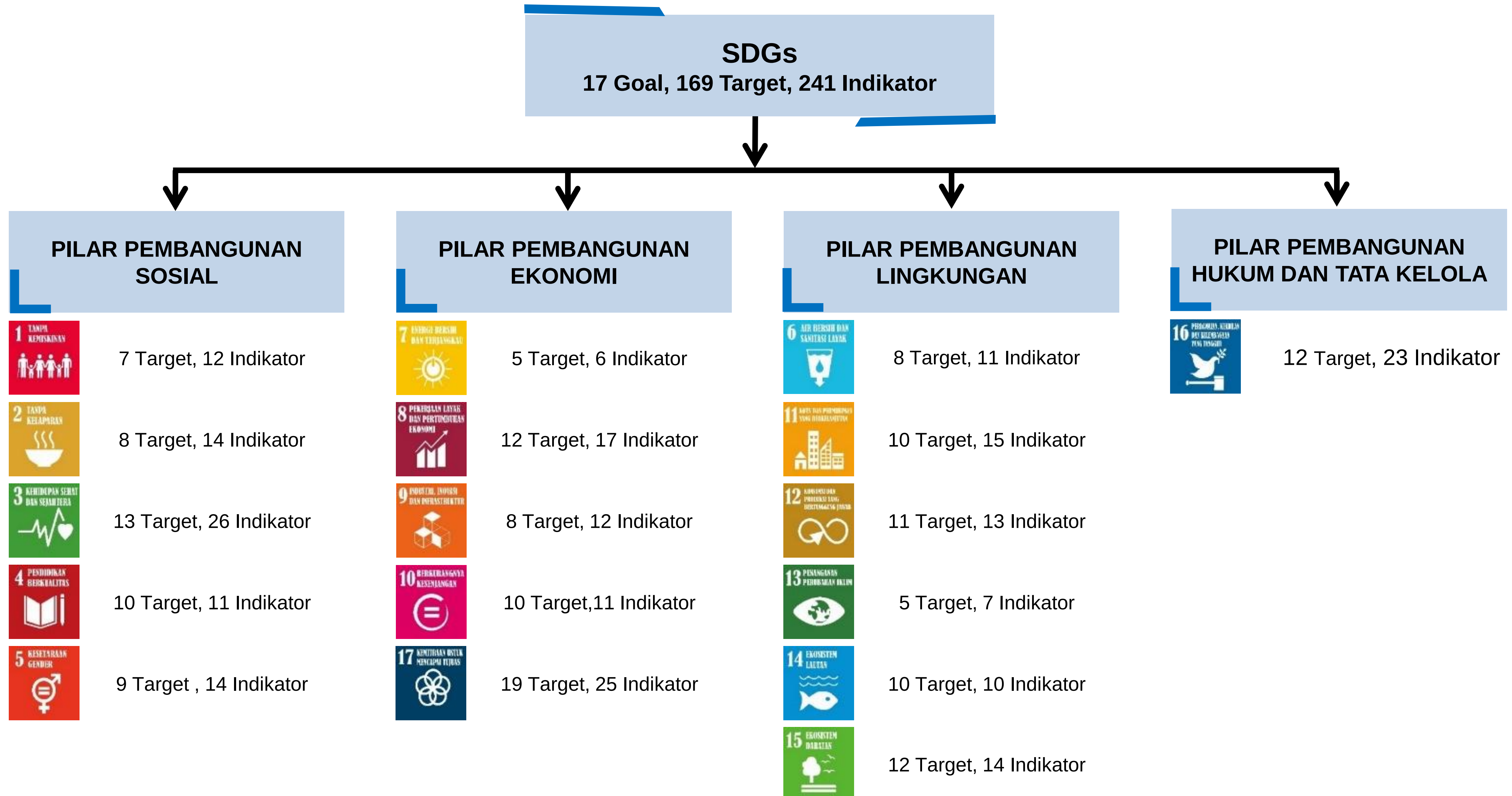
1. Advokasi kepada Pelaku Usaha
2. Fasilitasi Program/Kegiatan kepada Pelaku Usaha
3. Peningkatan Kapasitas
4. Dukungan Pendanaan

O

1. Diseminasi dan Advokasi kepada Masyarakat
2. Fasilitasi Program/Kegiatan di Lapangan
3. Membangun pemahaman publik
4. *Monitoring* Pelaksanaan

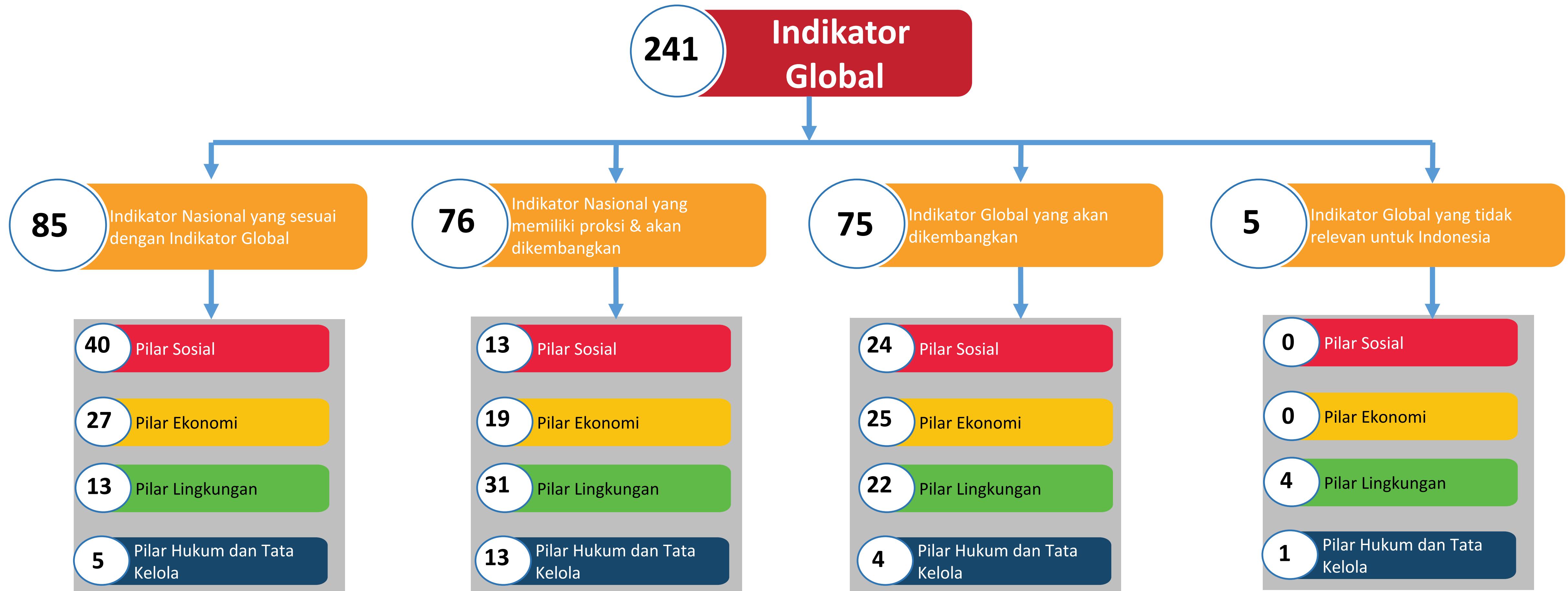
Kementerian PPN/
Bappenas

Pemetaan Goal, Target, & Indikator



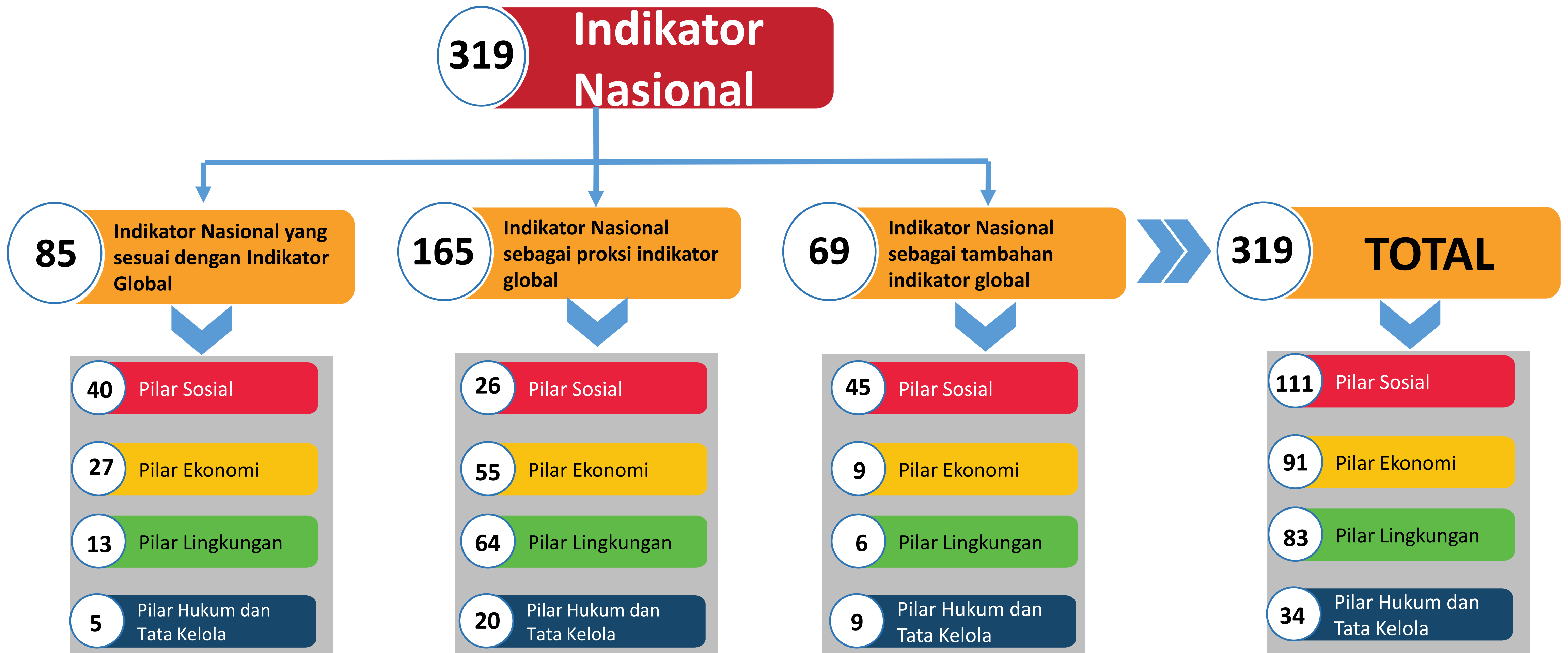
Kementerian PPN/ Bappenas

Pemetaan Indikator Global



Kementerian PPN/ Bappenas

Pemetaan Indikator TPB/SDGs Indonesia



Penjelasan Klasifikasi Pemetaan Indikator (1)

1. **Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global** yaitu indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya sama dengan metadata indikator global.

   •Contoh:

   1) Angka Kematian Ibu.
   2) Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan.
   3) Bauran Energi Terbarukan

2. **Indikator nasional sebagai proksi indikator global** yaitu indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi untuk menjawab metadata indikator global.

   •Contoh:

   1) Proporsi penduduk dengan akses terhadap layanan air minum layak sebagai proksi indikator proporsi penduduk dengan akses terhadap layanan air minum yang aman.
   2) Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai proksi indikator global kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial.
   3) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan

Penjelasan Klasifikasi Pemetaan Indikator (2)

3. Indikator global yang harus dikembangkan yaitu indikator global yang belum dimiliki Indonesia dan belum ada proksinya di nasional karena metadata global belum tersedia.

- Contoh:

  1) Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif.
  2) Indeks Kemiskinan Multidimensi.
  3) Rata-rata keasaman Laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.
  4) Jumlah kesepakatan kerja sama program-program di bidang sains dan/atau teknologi antarnegara menurut tipe kerja samanya.

- 4. Indikator Global yang Tidak Relevan dengan Nasional

- Contoh:

  1) Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum

Kementerian PPN/
Bappenas

TEKNIS PENYUSUNAN RAN TPB/SDGS

Kementerian PPN/ Bappenas

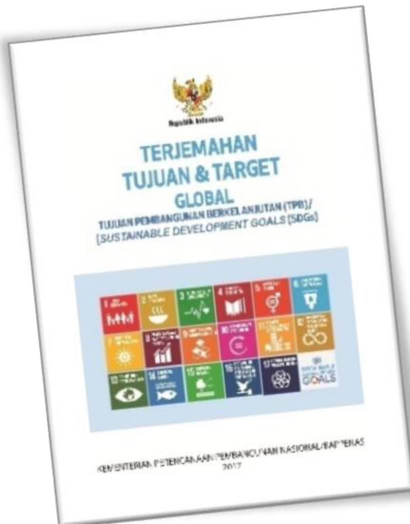
PEDOMAN TEKNIS TPB/SDGs

1. Terjemahan Tujuan & Target
2. Pedoman Penyusunan Renaksi
3. Ringkasan Metadata
4. Metadata setiap pilar















Fungsi Metadata SDGs

1. Acuan penyusunan Peta Jalan, RAN, RAD TPB/SDGs dibutuhkan persepsi yang sama tentang Tujuan, Target & Indikator TPB/ SDGs.
2. Mengukur ketercapaian tiap tujuan dan target TPB/ SDGs diperlukan metadata untuk tiap indikator TPB/ SDGs.
3. Metadata diperlukan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta keterbandingan pencapaian TPB/ SDGs antarnegara dan antardaerah di Indonesia.

Kementerian PPN/ Bappenas

Isi Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs

- **Penjabaran Goal dan Target ke dalam Indikator:**

a. Nama Indikator;
b. Konsep dan Definisi;
c. Cara Menghitung;
d. Manfaat;
e. Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data;
f. Disagregasi Data; serta
g. Frekuensi Pengumpulan Data.

Kementerian PPN/ Bappenas

Matriks Resume Metadata Indikator TPB/SDGs

8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



TUJUAN 8

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan *the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production*, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.	8.4.1	Jejak material (*material footprint*) yang dihitung selama tahun berjalan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	8.4.2	Konsumsi material domestik (*domestic material consumption*).	Indikator global yang akan dikembangkan.
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	Indikator global yang akan dikembangkan.

Kementerian PPN/ Bappenas

Contoh Metadata Indikator

Tujuan 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



TUJUAN 8

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

TARGET 8.1

Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

INDIKATOR 8.1.1*

Laju pertumbuhan PDB per kapita

KONSEP DAN DEFINISI

PDB per kapita (Ribu Rp) menunjukan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nominal PDB dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Laju pertumbuhan PDB Per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita dari periode t-1 ke periode t.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:
Laju pertumbuhan PDB Per kapita diperoleh dengan mengurangi nilai PDB per kapita pada periode ke - t terhadap nilai pada periode ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada periode ke t-1, dikalikan dengan 100 persen. PDB yang digunakan yaitu **PDB per kapita dengan harga konstan.**
Rumus:

$$\text{Laju PDBpk} = \frac{(PDBpk_t + PDBpk_{t-1})}{PDBpk_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:
PDBpk : PDB per kapita
$PDBpk_t$: PDB per kapita pada periode ke t
$PDBpk_{t-1}$: PDB per kapita pada periode ke t-1

MANFAAT

Mengukur perubahan pendapatan di dalam masyarakat.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Semester (nasional dan provinsi); atau
2. Tahunan (kabupaten/kota).

INDIKATOR 8.1.1.(a)

PDP per kapita

KONSEP DAN DEFINISI

PDB per kapita (Ribu Rp) menunjukan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nominal PDB dan jumlah penduduk. PDB per kapita di peroleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:
PDB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) diperoleh dengan cara membagi PDB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk.

Kementerian PPN/
Bappenas

PANDUAN PENYUSUNAN RAN SDGs

Kementerian PPN/ Bappenas

Pedoman Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Tujuan:

- ✓ Memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam menyusun dokumen rencana aksi TPB, sehingga dihasilkan produk dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional



Panduan Rencana Aksi Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB)

DAFTAR ISI

iii

Kementerian PPN/ Bappenas

Sistematika Dokumen RAN

- **BAB I PENDAHULUAN**
  1. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
  2. Permasalahan dan Tantangan
- **BAB II ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN SDGs**
  1. Uraian tentang Tujuan, Target dan Indikator SDGs
  2. Kebijakan (uraian per Tujuan)
  3. Program dan Kegiatan (uraian per Tujuan)
- **BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**
  1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
  2. Mekanisme Pelaporan
  3. Tanggung Jawab Masing-masing Platform
  4. Waktu Pelaksanaan.
- **BAB IV PENUTUP**
- **LAMPIRAN**
  1. Lampiran 1. Perpres Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
  2. Lampiran 2. Format Matriks RAN SDGs
  3. Lampiran 3. Daftar Tujuan, Target dan Indikator SDGs

Kementerian PPN/ Bappenas

Dokumen Rujukan Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

1. RPJMN/D periode berjalan
2. Renstra K/L atau OPD periode berjalan, dan RENJA K/L atau OPD
3. RKP/D tahun 2016 & 2017, 2018
4. Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
5. Laporan Pencapaian MDGs
6. Dokumen Kebijakan dan Renaksi Lain yang ada & terkait



Matriks Renaksi TPB/SDGs

BAG 1 — TARGET DAN INDIKATOR TPB

Target TPB (1)	Indikator TPB (2)	Satuan (3)	Tahun Dasar (4)	Target Pencapaian (5)				Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	

Kolom ini diisi dengan indikator sesuai dengan metadata

BAG 2 — PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Tahun dasar (3)	Target Pencapaian (4)				Indikasi Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta) (5)	Sumber Pendanaan (6)	Instansi Pelaksana (7)
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM PEMERINTAH										
Indikator TPB:										
Program1:										
Kegiatan1:	1.1 Output Kegiatan									
	1.1 Output Kegiatan									
Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
	2.2 Output Kegiatan									

Kolom ini diisi dengan indikator sesuai dengan metadata

BAG 3 — PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH NON PEMERINTAH

Nama Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Tahun dasar (3)	Target Pencapaian (4)				Indikasi Alokasi Anggaran (5)	Lokasi (6)	Sumber Pendanaan (7)	Instansi Pelaksana (8)
				2016	2017	2018	2019				
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Indikator TPB:											
Program 1:											
Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan										
	1.1 Output Kegiatan										
Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan										
	2.2 Output Kegiatan										

Kolom ini diisi dengan indikator sesuai dengan metadata

Contoh Pengisian Matrik Renaksi

TUJUAN 1: TANPA KEMISKINAN

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian 2016	2017	2018	2019	Instansi Pelaksana
TARGET 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yangtepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a) Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	42,5 (2012)	59,0	63,1	67,2	70,0	Kementerian Kesehatan
	1.4.1.(b) Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	54,9 (2012)	59,5	60,7	61,8	63,0	Kementerian Kesehatan
	1.4.1.(c) Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	61,9 (2012)	65,4	65,6	65,8	66	BKKBN
	1.4.1.(d) Persentaserumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	70, 00 (2014)	77,00	84,00	-	100,00	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.4.1.(e) Persentaserumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	69,42 (2014)	77,40	83,20	-	100,00	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.						Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.4.1.(g) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat	100,4 (2015)	100	100	100	100	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.4.1.(h) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat	104,52 (2015)	100	100	100	100	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.4.1.(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/MA/sederajat	104,44 (2015)	100	100	100	100	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.4.1.(j) Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran	75 (2015)	77,5	80	82,5	85	Kementerian Dalam Negeri
	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN					100	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

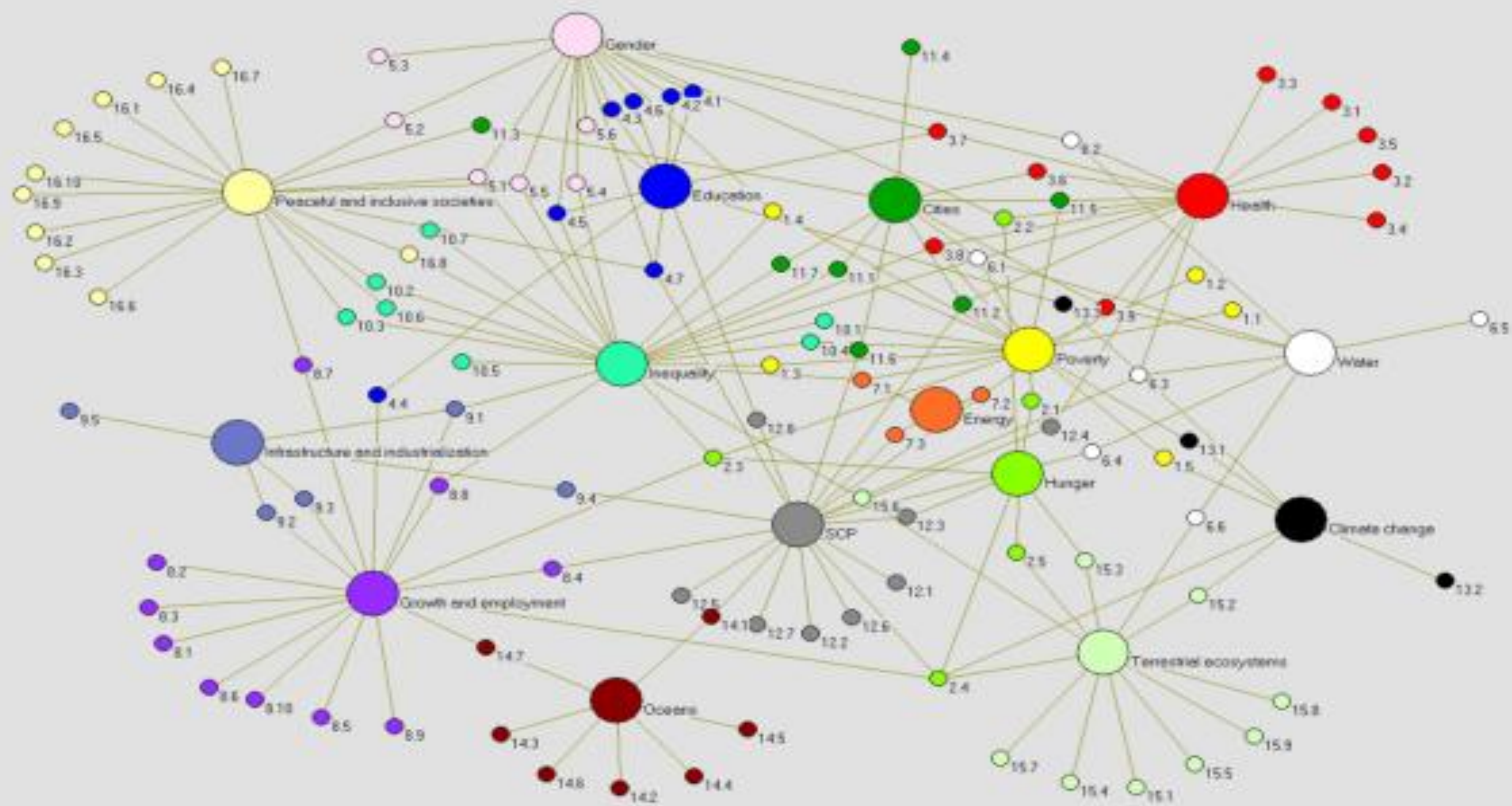


Kementerian PPN/ Bappenas

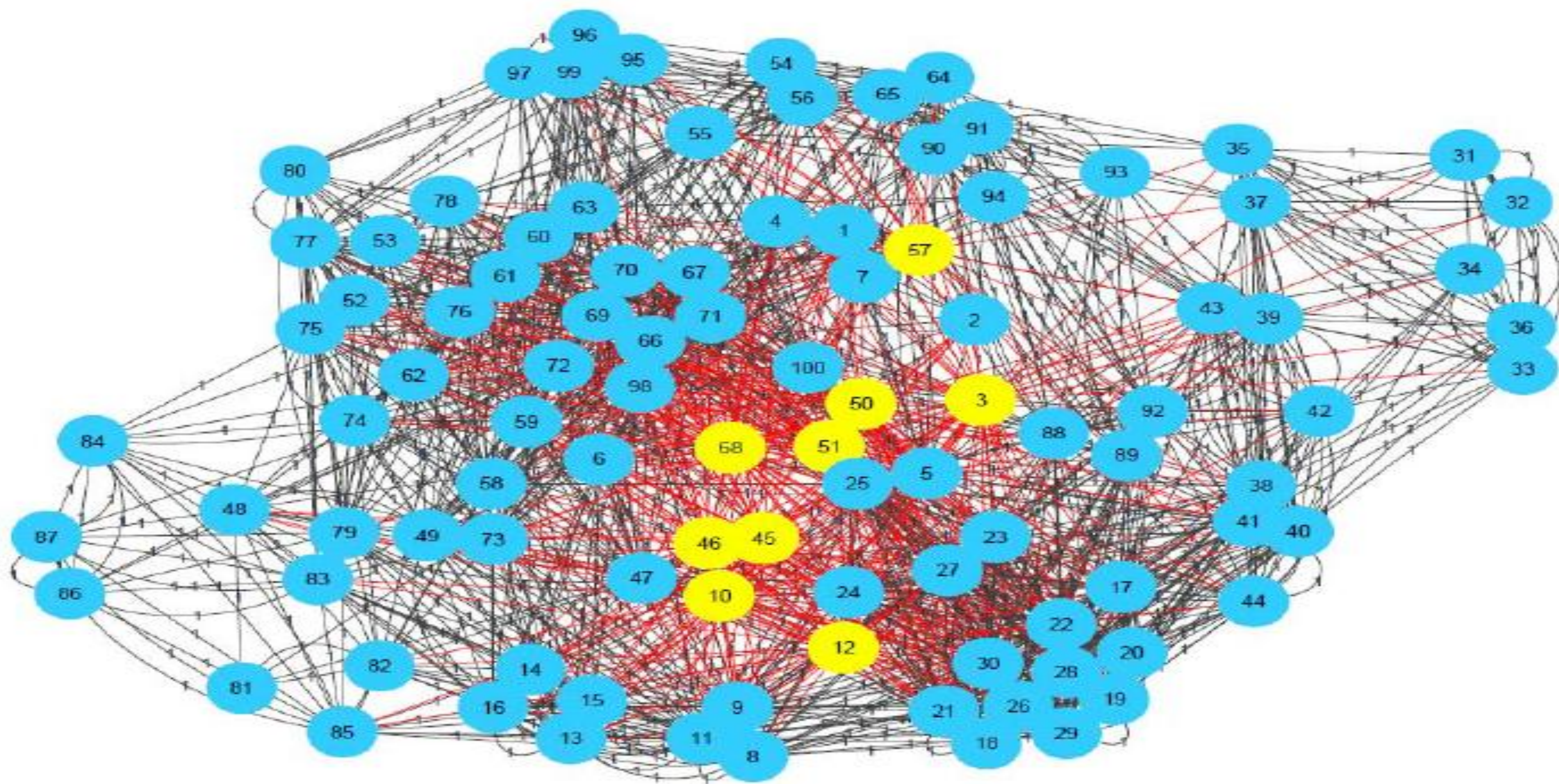
Contoh Pengisian Matrik Renaksi

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 th (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019			
PROGRAM NASIONAL PEMERINTAH									
INDIKATOR: 1.4.1(a) Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.									
PROGRAM 1: Pembinaan Kesehatan Masyarakat[b]									
Kegiatan 1: Pembinaan Kesehatan Keluarga	1.1. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	%	74	85a	86a	87a	2.852.100*	APBN	Kementerian Kesehatan
	1.2. Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	%	81	84	87	90		APBN	Kementerian Kesehatan
	1.3. Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	%	83	88	95	100		APBN	Kementerian Kesehatan
Kegiatan 2: Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	2.1 Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS	Unit	1.600	1.400	1.400	1.200	15.857.100[d]*	APBN	Kementerian Kesehatan
INDIKATOR: 1.4.1(b) Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.									
PROGRAM 1: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit[b]									
Kegiatan 1: Surveilans dan Karantina Kesehatan[b]	1.1 Kabupaten/kota yang mendapatkan peningkatan antigen imunisasic	Kab/kota	-	140	403	16	3.142.800	APBN	Kementerian Kesehatan
	1.2 Puskesmas yang memiliki rantai dingin (cold chain) untuk imunisasi	Unit	-	8.114	8.923	9.731		APBN	Kementerian Kesehatan
PROGRAM 2: Kefarmasian dan Alat Kesehatan									
Kegiatan 1: Peningkatan Tata Kelola Obat Publik & Perbekalan Kesehatan	2.1. Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	%	50	55	60	65	13.595.900	APBN	Kementerian Kesehatan
INDIKATOR: 1.4.1(c) Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.									
PROGRAM 1: Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Matriks K/L hal II.M.L.68-1)									
Kegiatan 1: Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah	1.1. Peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminanketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui SJSNKesehatan (PBI)	%	53,4	54	54,5	55	6.359.800	APBN	BKKBN
	1.2. Faskes yang mendapatkan pemenuhan sarana, alokon sesuai dengan standar pelayanan KB (85% dari 53.342 Faskes [illegible]	%	43,3	57,2	71,1	85			

The SDGs as a network of targets



9 key indicators in the network of 100 indicators



9 key indicators directly linked with 81 indicators

Sumber: IEGS

Kementerian PPN/ Bappenas

DOKUMEN SDGs

1. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017;
2. Terjemahan Baku Tujan dan Target Global SDGs;
3. Ringkasan Metadata SDGs Indonesia;
4. Pedoman Rencana Aksi Nasional;
5. Metadata Indikator SDGs Pilar Sosial;
6. Metadata Indikator SDGs Pilar Lingkungan;
7. Metadata Indikator SDGs Pilar Hukum dan Tata Kelola;
8. Metadata Indikator SDGs Pilar Ekonomi ;
9. Factsheet SDGs Indonesia ;
10. Final Report VNR 2017 SDGs Indonesia;
11. Strategi Komunikasi SDGs.









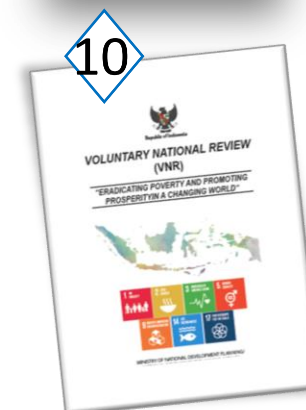














Kementerian PPN/ Bappenas

TERIMA KASIH



- Alamat Kontak:
- Website : http://sdgs.bappenas.go.id/
- Facebook : SDGsIndonesia
- Twitter : @SDGs_Indonesia
- Email : sekretariat.sdgs@bappenas.go.id
- Telepon : Dit. Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
- (021-392 6254) dan Sekretariat SDGs (021-579 45716)